



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE SYARIEF HIDAYATULLAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 252879

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.802.000.000**

1. Tanah Seluas 1.352 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 132.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/10 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 133.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 578.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
CILEGON , HASIL SENDIRI , Rp. 737.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.202.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **138.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 1996, HASIL
SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000



3. MOBIL, SUZUKI AKN415F (4X2) A/T MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.020.300.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.020.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAUNDRA BAYYU AJIE
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 258977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.757.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/40 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 761.000.000
2. Tanah Seluas 1.522 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 761.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 640.800.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.025.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.518.325.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.518.325.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SETIAWANDI HAKIM**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **424700**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **13.670.000.000**

1. Tanah Seluas 1.827 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 916.000.000
2. Tanah Seluas 3.200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.651.000.000
3. Tanah Seluas 926 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 465.000.000
4. Tanah Seluas 4.290 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 2.147.000.000
5. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 377.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/21 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/50 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 262.000.000
8. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 311.000.000
9. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 311.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.052.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA



SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000

12. Tanah Seluas 1.678 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.619.000.000

13. Tanah Seluas 2.055 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.157.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **195.350.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.350.000

2. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **650.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **4.800.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **13.870.800.000**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **13.870.800.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IPAN MOCHAMAD IMRON ABDURAHMAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 408656

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	463.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2023, LAINNYA Rp. 220.000.000		
4. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
5. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.967.500.000
III. HUTANG	Rp.	840.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.127.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALAN SUHERLAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PPERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM
3. NHK : 454535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	465.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.150.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	481.662.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	481.662.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHMAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN
3. NHK : 468935

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	155.486.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA ADIPI Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 35.486.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.699.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.222.685.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.222.685.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IMAN WAHYUDIN
NIK : 3604090809760002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Unit Kerja : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Kerja : BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
: BIDANGKEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 23 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : INU SASONGKO
- Jabatan** : KEPALA SEKSI PENYELENGGARAN PEMETAAN RAWANKEBAKARAN
- NHK** : 434615

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	860.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	265.000.000
1. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5V A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	33.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.505.723
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.170.505.723
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.170.505.723

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRLAN FAUJI, SH, M.AP
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. NHK : 468970

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	170.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/82 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.521.345
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	296.521.345

III. HUTANG Rp. 70.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 226.121.345

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.